BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa yang bisa disebut dengan LPD sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang mencerminkan adanya komunitas pada masyarakat berdasarkan atas prinsip hukum adat di Bali. Lembaga keuangan mikro tersebut memiliki karakter yang sangat khas karena sebagai lembaga komunitas yang tercipta dan didirikan untuk masyarakat yang ada di desa pakraman (Putri et al, 2018). Peranan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Badan Usaha Milik Desa yang dikelola desa adat pakraman dengan operasionalnya untuk kegiatan perekonomian di masyarakat.

Dalam menyusun laporan keuangan harus disertai dengan beberapa pertimbangan supaya hasil pelaporannya tersaji secara sistematis dan berkualitas. Baik buruknya suatu laporan keuangan dilihat daricara penyajiannya yang mengandung informasi jujur dan akurat. Penyajian laporan keuangan harus informative dan bermanfaat bagi para pihak pengambilan keputusan terkait ekonomi. Laporan keuangan sering kali digunakan untuk memutuskan keputusan penanaman modal, perjanjian kompensasi dan syarat utang piutang, perjanjian kontrak. Oleh karena itu, laporan keuangan harus berkualitas sebab laporan yang jelek dapat berdampak negative pada keputusan yang diambil oleh pihak yang berkepentingan (Dewi dan Ernawatiningsih, 2019).

Sekarang ini banyak bermunculan masalah mengenai kualitas pelaporan keuangan, dimana kualitas pelaporannya yang tidak informative dan berkualitas rendah, baik laporan keuangan dari organisasi swasta maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mengenai permasalahan tersebut. Buruknya kualitas pelaporan keuangan yang buruk yang disajikan mampu memicu kecurangan. Contoh kualitas laporan keuangan yang buruk seperti terdapat pengambilan keputusan yang salah, tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa bertanggung jawab atas aliran dana perusahaan, keakuratan data yang diragukan (Dewi dan Ernawatiningsih, 2019).

Permasalahan tersebut memicu dalam penyalahgunaan dana dalam LPD tersebut. Salah satunya LPD Serangan yang sudah tutup dari Oktober 2020, dimana dari temuan tim penyelamatan LPD dan hasil audit ditemukan bahwa Bendesa Adat menggunakan uang LPD sebanyak Rp5,8 miliar, yang awalnya dari asset Rp4,8 miliar, terdapat data pinjaman oleh Bendesa menggunakan dana tersebut sebesar Rp4 miliar. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan peningkatan kinerja laporan keuangan, dimana kualitas pelaporan kuangan yang baik akan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang ada, sehingga detail kas keluar dan masuk akan terlihat dengan jelas. Sehingga adapun yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan LPD yaitu dengan menyusun laporan keuangan yang bermutu seperti dibutuhkannya berbagai faktor yang mendukung penyusunan tersebut yaitu tingkat pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi (Suari dkk, 2019).

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan lembaga keuangan milik komunitas adat diatur secara mandiri oleh Peraturan Daerah artinya tidak diatur oleh pemerintah seperti otoritas jasa keuangan lainnya (Astrayani, 2017). Kinerja keuangan LPD dikatakan baik pada saat penilaian seluruh aspek keuangan maupun manajemen yang dilakukan berpredikat “sehat”. Setiap LPD tentunya menyajikan pelaporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna.

Pengungkapan pelaporan keuangan merupakan mekanisme yang paling efisien dan efektif untuk mendorong pemimpin dalam pengelolaan perusahaan (Nudilah, 2018). Pemimpin termotivasi untuk mengelola perusahaan lebih baik jika informasi dalam pelaporan keuangan memiliki kualitas yang lebih baik. Pelaporan keuangan yang berkualitas dapat membantu investor, kreditor, dan orang lain yang tertarik pada perusahaan.

Pemahaman akuntansi sangatlah diperlukan dalam membuat atau menyusun suatu laporan keuangan. Dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan itu lebih baik dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri (Astrayani, 2017). Dalam membuat pelaporan keuangan seorang akuntan harus memahami isi dalam laporan tersebut. Jika seorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi maka sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan.

Irfan (2017) menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya Astrayani (2017), menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh Astrayani (2017), untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Salah satu penerapan dari struktur pengendalian intern adalah dengan adanya auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Menurut Peraturan Gubernur Bali No 3 Tahun 2017 tentang Pengurus dan Pengawas Internal LPD pasal 10, menyatakan bahwa yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern LPD adalah Badan Pengawas LPD. Pengawas intern merupakan kegiatan yang penting untuk menilai apakah semua kebijakan yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan tepat dan apabila terjadi penyimpangan, pengawas harus segera melakukan tindakan koreksi agar tujuan LPD dapat tercapai. Pembentukan Badan Pengawas pada LPD diatur dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 491 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pembentukan Badan Pengawas yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang digantinya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang LPD.

Sukma (2018) dan Dewi (2018) menguji tentang pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas pelaporan keuangan menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Sedangkan Astrayani (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Penggunaan teknologi informasi merupakan sikap akuntan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Menurut (Chodijah & Hidayah, 2018), menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Menurut penelitian dari Basudewa & Putri (2020), Utari, dkk (2020) menunjukkan kualitas laporan keuangan dapat berpengaruh positif sedangkan hasil penelitian Sundari & Rahayu (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Bayuaji (2017:15), profesionalisme merupakan sebuah sikap profesional yang tiada lain adalah perilaku karyawan yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau aktifitas seseorang yang merupakan sikap dalam menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang dikuasai dengan melaksanakan aturan- aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja yang terbaik. Menurut Simanjuntak (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan Wahyono (2017) melakukan penelitian tentang

pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang berbeda yaitu profesionalisme berpengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan.

Perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usahanya, memerlukan seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik. Etika seorang pemimpin merupakan suatu hal yang penting. Etika kepemimpinan dalam menjalankan kegiatan organisasi merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi keseharian. Tanpa adanya etika kepemimpinan yang efektif dapat mengakibatkan keseimbangan organisasi terganggu (Astrayani, 2017). Etika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin organisasi dalam menjalankan organisasi itu sendiri dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan karakter diri terutama dalam kekokohan mental dan spiritual, dengan demikian, maka karyawan cenderung untuk mempercayai pemimpinnya atau atasannya karena karyawan merasa bahwa atasannya mampu untuk menerapkan norma dan nilai masyarakat dalam perusahaan atau organisasi dalam melakukan laporan keuangan, karyawan tidak akan merasa terbebani karena merasa bahwa yang mereka kerjakan bisa diterima oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang ada.

Putra (2017), Nudilah (2018), Sukma (2018) menyatakan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan Triastuti (2017), Septiana (2017), Pradiska (2018), Silviani (2018) membuktikan bahwa etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kondisi kesehatan keuangan pada suatu perusahaan yaitu LPD dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh LPD cenderung dipengaruhi oleh unsur internal seperti masyarakat setempat yang memilih Ketua LPD melalui musyawarah tanpa memperhatikan pengalaman yang dimiliki maupun pendidikan dari Ketua LPD tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan banyak terjadi kendala karena kurangnya pemahaman pengelola LPD termasuk karyawan dalam menata keuangan perusahaan (Permatasari dan Agustina, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Profesionalisme, Dan Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Denpasar Utara”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara?
- 2) Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara?
- 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara?

- 4) Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara?
- 5) Apakah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara?

1.3. Tujuan penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang diuraikan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris fungsi badan pengawas terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris profesionalisme terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris etika kepemimpinan terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD Kecamatan Denpasar Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat dari berbagai pihak, diantaranya yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh dan membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, khususnya mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, profesionalisme, dan etika kepemimpinan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kecamatan Denpasar Utara, serta sebagai pedoman penelitian selanjutnya yang membahas lingkup masalah yang sama.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk langkah selanjutnya agar lebih etis dan profesional terutama dalam kualitas laporan keuangan, serta dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan lagi dalam pembuatan pelaporan keuangan yang berkualitas.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Teori Kelembagaan Lama (*Old-institutional theory*)

Teori kelembagaan lama atau *institutional theory* dapat didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan berkembang dan bertahan ketika berada dalam lingkungan yang kompetitif yang penuh dengan para pesaing, serta mempelajari bagaimanacara perusahaan untuk memuaskan *stakeholder* (Astrayani, 2017). Hasibuan dan Santoso (2018), menyatakan bahwa inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah dan hukum.

Terdapat dua teori yang berkaitan dengan teori kelembagaan ini yaitu teori kelembagaan lama (*Old-institutional theory*) dan teori kelembagaan baru (*New-institutional theory*). Pendapat yang dikemukakan para ahli tentang kedua teori tersebut yaitu di dalam teori kelembagaan lama seorang ahli yang bernama Louis mempercayai bahwa masyarakat mengidentifikasi suatu organisasi berdasarkan norma dan nilai yang dianut organisasi tersebut (Astrayani, 2017), sedangkan *New-institutional theory* menurut seorang ahli yang bernama Burn dalam Astrayani (2017) digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama dalam suatu organisasi, objek analisis dalam teori kelembagaan lama adalah individu dan pada

kelembagaan baru objek analisisnya adalah organisasi, sehingga penelitian ini menggunakan *Old-institutional theory* karena yang diteliti adalah karakter orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan yaitu pengaruh tingkat pemahaman akuntansi dari karyawan, fungsi anggota badan pengawas dalam melakukan tugasnya, pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki karyawan, profesionalisme yang dimiliki karyawan, serta etika yang dimiliki pemimpin.

2.1.2. Lembaga Perkreditan Desa

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menetapkan Raperda tentang Lembaga Perkreditan Desa menjadi Perda berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Bali No 12 Tahun 2017 disana disebutkan sebagai lembaga perekonomian milik desa pakraman, LPD dikelola dan diarahkan untuk berkontribusi bagi pembangunan desa pakraman dan dijelaskan pula bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu wadah kekayaan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup Krama Desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berkembang sejak tahun 1985 yang dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa atas dasar pertimbangan bahwa:

- 1) Desa Pakraman merupakan lembaga tradisioanal yang lebih mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama karena pakramannya (anggota desa pakraman).
- 2) Desa Pakraman mempunyai aturan – aturan yang telah disepakati dan dipatuhi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

- 3) Desa pakraman merupakan suatu lembaga tradisional dan bersifat kelompok yang didasarkan kepada geografis pakraman.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali No 3 Tahun 2017 tercantum fungsi dan tujuan LPD, antara lain:

- 1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.
- 2) Memberantas gadai gelap dan sejenisnya.
- 3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
- 4) Meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Keputusan peralihan Undang- Undang Perbankan No. 7 Pasal 58 Tahun 1992 menyatakan bahwa: Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Negari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD) , Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produk Desa (BKPD), dan lembaga- lembaga lain yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan rakyat (BPR) setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada krama desa dan di dalam melaksanakan dan mengelola LPD pengurus dapat mengangkat karyawan dalam membantu kegoatan operasional lembaga. Pasal 7 Peraturan Provinsi Tingkat I Bali Nomor 3

Tahun 2017 menyebutkan bahwa kegiatan- kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LPD adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- 2) Memberi pinjaman kepada Krama Desa dan Desa.
- 3) LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat yang ada kerjasama antar Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- 4) Meneima pinjaman dari lembaga- lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atas bantuan dana.
- 5) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

LPD dalam kegiatan usahanya menerima dan menyalurkan dana pada masyarakat desa adat serta kegiatan jasa keuangan yang sejenis. Dapat disimpulkan bahwa LPD merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang identik dengan jasa bank yaitu sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat. LPD sebagai lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan LPD dilakukan oleh badan pengawas yang di angkat dan diberhentikan oleh krama desa melalui paruman dan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota sebagai kepala daerah.

2.1.3. Pemahaman Akuntansi

a) Pengertian Akuntansi

Beberapa ahli menganggap bahwa pengertian akuntansi sebagai salah satu seni (*art*), yaitu seni dalam pengukuran, komunikasi serta menafsirkan atau menginterpretasikan aktivitas keuangan. Pengertian akuntansi secara lebih mendalam adalah aktifitas penghitungan, pengukuran, penjabaran, atau memberi kepastian terhadap data dan informasi yang akan menolong atau membantu investor, manajer, otoritas pajak, pembuatan keputusan yang lain sehingga perusahaan, organisasi ataupun lembaga lainnya mampu membuat alokasi sumber daya.

Beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu:

- 1) Definisi akuntansi berdasarkan AICPA, menyatakan bahwa pengertian akuntansi sebagai seni (*art*) dalam pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang secara umum bersifat keuangan termasuk juga dalam menginterpretasikan hasilnya.
- 2) AAA (*American Accounting Association*), memberikan pengertian akuntansi sebagai proses mengidentifikasi (*to identify*), mengukur (*to measure*), dan melaporkan informasi (*to report*) ekonomi guna terjadinya penilaian- penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang memanfaatkan informasi tersebut, sehingga akuntansi harusnya dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan dalam

mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta menyangkut keuangan.

- 3) Hongren dan Harrisson beranggapan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktifitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dalam pengertian akuntansi ini, akuntansi dianggap sebagai sebuah regulasi atau sistem yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

b) Pemahaman Akuntansi

Paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara, pembuatan, memahami, atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai dalam melakukan proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan.

Pemahaman akuntansi juga merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik, untuk lebih memahami akuntansi secara komprehensi, mengetahui sistem dan prosedur akuntansi, standar akuntansi yang berlaku, kebijakan akuntansi serta memahami komponen- komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

2.1.4. Fungsi Badan Pengawas

Peran badan pengawas internal secara aktif mengawasi kebijakan, operasional dan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan dan menjadi penghubung antar pengelola dengan auditor eksternal. LPD sebagai lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sesuai dalam pasal 1 ayat (11) Perda No. 3 Tahun 2017, yang dimaksud dengan badan pengawas internal atau panureksa adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Devisi audit pada LPD adalah Badan Pengawas Internal yang sering disebut dengan Badan Pengawas Desa yang secara kelembagaan harus memahami seluruh elemen pengendalian yang terdiri dari:

- 1) Evaluasi pengelolaan risiko

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

- 2) Evaluasi pengendalian

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisien, dan efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong meningkatkan pengendalian intern secara kesinambungan.

3) Evaluasi proses tata kelola (*governance*)

Menurut IIA fungsi audit internal harus berfungsi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola dalam mencapai tujuan. Dan selain itu audit intern harus mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektifitas dari kegiatan, program, dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika.

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1998 mengenai Pembentukan dan Kedudukan Badan Pengawas adalah sebagai berikut, di tiap- tiap LPD dibentuk badan pengawas LPD :

- 1) Badan pengawas disebut juga dengan Panureksa
- 2) Ketua badan pengawas/ Pamuncuk dijabat secara langsung oleh Bendesa.
- 3) Ketua dan anggota badan pengawas tidak diperkenankan merangkap sebagai badan pengurus LPD atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Tugas dari badan pengawas LPD adalah:

- 1) Mensosialisasikan keberadaan LPD.
- 2) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD.
- 3) Mengawasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah.
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara periodic atau terjadwal serta identitas sesuai dengan program kerja badan pengawas.

Seorang pengawas LPD memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab ini dibagi kedalam 4 (empat) fungsi yaitu:

1) Fungsi Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan pengawas harus terlibat dalam menetapkan rencana operasi yang terintegrasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta menganalisis dan mengkomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam manajemen LPD. Salah satunya yang disebut dengan program kerja (Firdaus & Wasilah, 2017).

2) Fungsi Pengendalian

Dalam fungsi pengendalian pengawas harus mengembangkan dan menetapkan norma-norma sebagai ukuran pelaksanaan dan menjadikan pedoman kepada manajemen dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan, yang selanjutnya perlu diadakan analisis perbandingan antara pedoman dengan realisasi secara menyeluruh (Firdaus & Wasilah, 2017).

3) Fungsi Pelaporan

Fungsi pelaporan pengawas perlu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil-hasil yang dicapai oleh manajemen untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat rutin yang dilakukan secara periodik dan terprogram. Pengawas dan manajemen dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan secara bersama pula dapat

memikirkan jalan keluar yang harus dilakukan apabila ditemukan kendala operasional di lapangan (Firdaus & Wasilah, 2017).

4) Fungsi Akuntansi

Dalam fungsi akuntansi, pengawas ikut melaksanakan, menetapkan, dan memelihara sistem akuntansi pada semua jenjang dan usaha LPD agar terjamin kewajaran semua transaksi keuangan sesuai dengan syarat pengendalian intern yang baik. Fungsi ini menyakinkan pengawas bahwa semua transaksi yang terjadi di LPD telah dicatat tepat waktu, telah diotorisasi oleh orang yang berwenang dan dilaksanakan oleh orang yang tepat (Firdaus & Wasilah, 2017).

2.1.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan

besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut ITTA (*Information Technology Association of America*) teknologi informasi merupakan suatu studi, perancangan implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak.

Menurut (Rintho, 2018:3) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi pengolahan data elektronik, dan beberapa informasi penting yang bisa diperoleh oleh masyarakat dengan cepat dan murah.

2.1.6. Profesionalisme

Istilah profesionalisme berasal dari kata profesi yang mempunyai arti suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, mencakup ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan metode. Profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi dan

latihan yang khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas- tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan dan profesinya.

Seorang yang profesional akan dipercaya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat berjalan dengan lancar serta mendatangkan hasil yang diharapkan. Profesionalisme berkaitan dengan dua aspek penting yaitu aspek structural dan aspek sikap (Jasmadeti et al, 2018). Aspek structural yang karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan sekolah pelatihan, pembentukan asosiasi profesional dan pembentukan jiwa profesionalisme (Taman et al, 2018).

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individu yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak (Jasmadeti et al, 2018). Maka dapat disimpulkan profesionalisme tidak hanya berbicara tentang soal kecocokan antara keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang saja, tetapi juga menyangkut kemampuan dalam mengantisipasi segala perubahan lingkungan termasuk kemampuan dalam merespon aspirasi public dan melakukan inovasi yang pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi mudah dan sederhana.

2.1.7. Etika Kepemimpinan

Peranan LPD sebagai Badan Usaha Milik Desa yang dikelola desa adat pakraman dengan operasionalnya untuk kegiatan perekonomian di masyarakat, membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik, agar LPD yang dijalankan dapat terus berkembang (Holt et al, 2018).

Etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimanacara pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Di dalam hal ini, etika akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam suatu organisasi. Kepemimpinan seorang manajer dapat dikatakan baik jika manajer tersebut dapat menjalankan etika yang baik. Etika kepemimpinan dapat terwujud apabila:

- 1) Pemimpin memiliki sifat jujur kepada pengikutnya.
- 2) Pemimpin dapat dipercaya oleh para pengikutnya sehingga pengikutnya akan merasa aman didekat si pemimpin.
- 3) Memiliki hubungan yang positif dengan pengikutnya.
- 4) Dapat menerima saran dan kritik yang diberikan oleh pengikutnya.
- 5) Dapat menilai dan memahami kinerja para pengikutnya.
- 6) Dapat bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan dengancara menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 7) Memiliki sifat adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain.

2.1.8. Kualitas Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan (Suteja, 2018).

Chariri dan Ghozali (2018:161) menyatakan bahwa pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan, informasi pelengkap, dan media

pelapor lainnya, sedangkan laporan keuangan hanya mencakup neraca, laba – rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal itu berarti pelaporan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan laporan keuangan.

Menurut Hanafi dan Halim (2017) terdapat tiga bentuk laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh perusahaan secara umum, yaitu:

1) Neraca

Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Neraca dapat digunakan sebagai gambaran potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (snapshot keuangan perusahaan), yang meliputi asset sumber daya perusahaan dan klaim atas asset tersebut meliputi utang dan saham pribadi. Asset perusahaan menunjukkan keputusan penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa lalu. Dengan demikian, neraca adalah menampilkan keseimbangan antara keputusan investasi dengan keputusan pendanaan.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Berbeda dengan neraca yang merupakan snapshot maka laporan laba rugi hanya mencakup kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu saja.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aliran kas yang masuk maupun keluar bersih pada suatu periode waktu yang

merupakan hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan yaitu operasional, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Dengan neraca pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat membuat keputusan strategi-strategi apa yang akan diambil untuk keberhasilan perusahaan. Dengan laporan laba rugi, perusahaan dapat melihat prospek perusahaan tersebut dimasa depan. Sedangkan dengan laporan arus kas, dapat digunakan sebagai referensi para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan apakah kinerja tersebut bersifat baik atau buruk. Laporan arus kas juga akan memudahkan para pengguna laporan keuangan memahami laporan keuangan dengan baik sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat memberikan pemahaman dan informasi lebih tentang manajemen dan kondisi perusahaan itu sendiri. Kualitas laporan keuangan yang baik memiliki empat karakteristik yaitu:

- 1) Relevan

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini,

dan memprediksi masa dengan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Informasi yang relevan yaitu:

- a) Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu, yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
- 2) Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan dan tidak berbeda jauh.
- 3) Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan artinya informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

- a) Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam satu tahun.
 - b) Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (antar entitas).
- 4) Dapat Dipahami

Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Astrayani (2017) yang menguji pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sampel dari penelitian ini yaitu seluruh akunting LPD yang ada di kecamatan Abiansemal yang berjumlah 34 orang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di kecamatan Abiansemal sedangkan fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan di LPD di kecamatan Abiansemal.

Basar (2017) yaitu meneliti tentang pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gowa. Variabel independen pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Putra (2017) meneliti pengaruh etika kepemimpinan dan fungsi audit internal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Variabel independen etika kepemimpinan dan fungsi audit internal sedangkan variabel dependennya adalah kualitas pelaporan keuangan, dimana jumlah sampel dalam penelitian ini 45 orang akuntan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa etika kepemimpinan dan fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Septiana (2017) meneliti pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Variabel independen etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi sedangkan variabel dependennya adalah kualitas pelaporan keuangan, dimana sampel dalam penelitian ini adalah seluruh akunting LPD yang ada di kabupaten Gianyar. Teknik analisis ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Irfan (2017) yang menguji tingkat pemahaman akuntansi dan pemanfaatan SIA terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel dari penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang bekerja sebagai pembuat laporan keuangan LPD kecamatan Tampaksiring yang berjumlah 60 orang. Teknik analisis ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi dan pemanfaatan SIA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Utama (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian internal sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan, dimana jumlah sampel dalam penelitian ini 75 orang yang menjabat sebagai eselon keempat di satuan kerja daerah di Indragiri Hulu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Riandani (2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi Sdm, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada Skpd. Kab. Limapuluh Kota). Sampel dari penelitian ini yaitu dines pekerjaan umum sumber daya air Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 49 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Nudilah (2018) meneliti pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan, dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kota Denpasar sedangkan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan LPD di kota Denpasar.

Yanti (2018) meneliti pengaruh etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, dan fungsi badan pengawas terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sampel dari penelitian yaitu seluruh lembaga perkreditan desa di

kabupaten Gianyar, lembaga perkreditan desa yang masih beroperasi, dan lembaga perkreditan desa yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan, dan kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Handayani (2018) yang menguji pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sampel dari penelitian ini yaitu seluruh *accounting* LPD yang ada di kabupaten Gianyar. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

UNMAS DENPASAR